

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah sosial ekonomi Indonesia adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang masih belum terselesaikan. Kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi sumber daya, baik material maupun non material. Masalah kemiskinan muncul dikarenakan adanya sebagian orang yang masih belum mampu untuk mengatur kehidupannya hingga taraf yang manusiawi Purnama (2017). Kemiskinan di Indonesia juga cenderung lebih tinggi di daerah pedesaan dan kawasan terpencil, di mana akses terhadap pendidikan, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar sering kali terbatas. Selain itu, ketimpangan distribusi ekonomi antarwilayah memperburuk kondisi kemiskinan, di mana sebagian besar sumber daya dan pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di kota-kota besar di Pulau Jawa, sedangkan wilayah timur dan utara Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan.

Indonesia merupakan negara yang masih terperangkap di dalam kemiskinan. Lingkaran perangkap kemiskinan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat terjebak dalam kemiskinan karena berbagai faktor yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Negara akan tetap miskin dan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik Arifin (2019). Tingkat kemiskinan Indonesia menunjukkan tren penurunan sejak September 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan jumlah penduduk miskin berkurang

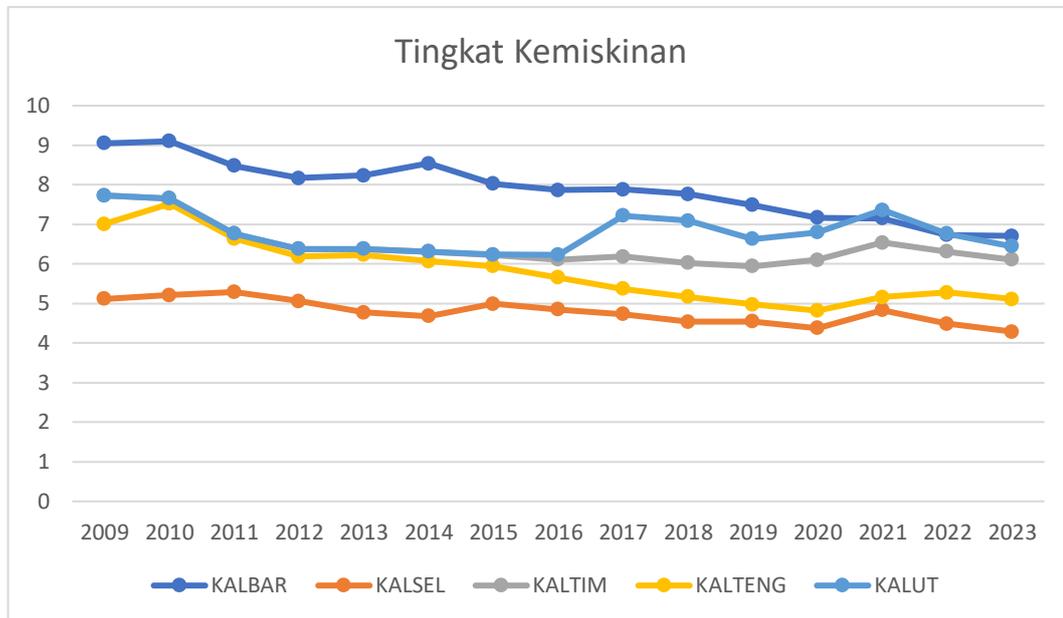
460 ribu jiwa per Maret 2023.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2024, Persentase penduduk miskin di Indonesia turun sebesar 0,33%, Dimana pada bulan Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta jiwa dengan rata-rata garis kemiskinan penduduk Indonesia sebesar Rp 582.932 per kapita per bulan. Kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor lain seperti Pertumbuhan ekonomi, Sumber Daya Manusia, Pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemiskinan sering terjadi di daerah pelosok atau daerah yang terpencil. Akses bantuan atau logistik juga terbatas yang dikarenakan kondisi geografisnya. Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Kalimantan. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat saat ini sebesar 6,71% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 336,08 ribu jiwa, serta garis kemiskinan per kapita sebesar Rp 595.509 per bulan (BPS, 2024).

Indonesia terdiri dari 38 Provinsi yang salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat dijuluki sebagai provinsi seribu sungai karena selaras dengan kondisi geografis dan memiliki jumlah penduduk terbanyak di pulau kalimantan. Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, mulai dari sumber daya tambang hingga keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kalimantan Barat juga memiliki berbagai permasalahan sosial yang dihadapi seperti daerah lainnya, salah satunya kemiskinan. Kemiskinan masih menjadi masalah sosial setiap tahunnya dan harus segera diatasi dengan baik. Kondisi kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat dapat diunjukkan pada gambar dibawah grafik ini (BPS, 2024).

Gambar 1.1

**Grafik Presentase Tingkat Kemiskinan Provinsi di Pulau Kalimantan
Tahun 2009 - 2023**



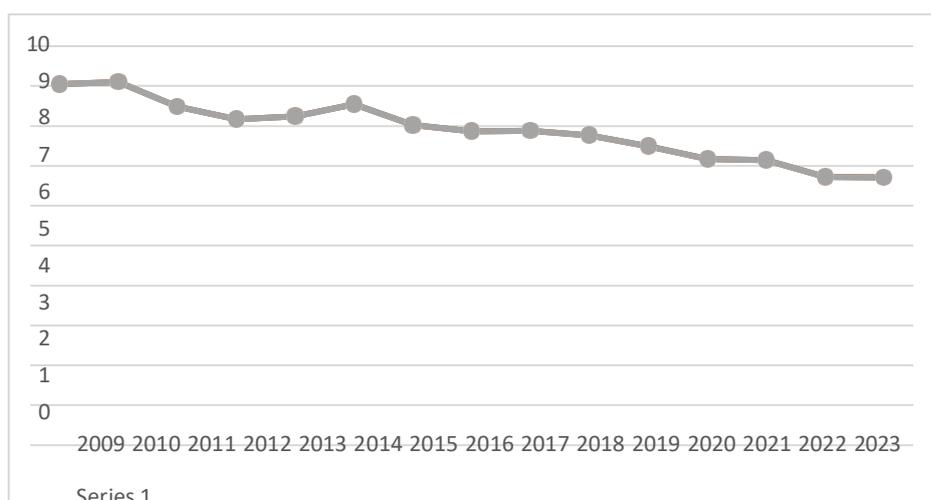
Sumber: BPS, Data Diolah (2024)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dari tahun 2009-2023 terlihat bahwa secara umum tingkat kemiskinan tertinggi ada di provinsi Kalimantan Barat. Kemiskinan di Kalimantan Barat masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, khususnya di daerah pedesaan dan wilayah terpencil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi yang berada di Pulau Kalimantan. Penyebab utama tingginya tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan Barat meliputi ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta rendahnya keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. Kondisi ini mengakibatkan pendapatan masyarakat cenderung rendah, sehingga sulit untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Meskipun Kalimantan Barat memiliki kekayaan alam yang melimpah, seperti hasil tambang, perkebunan, dan kehutanan, namun angka kemiskinan relatif tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Indonesia. Faktor utama yang memengaruhi kemiskinan di Kalimantan Barat adalah seperti keterbatasan akses terhadap ketersediaan infrastruktur, lapangan pekerjaan dan layanan kesehatan terutama di daerah terpencil atau pedesaan. Selain itu, ketidakmerataan distribusi ekonomi antara perkotaan dan pedesaan juga dapat memperburuk kondisi masyarakat di pedesaan. Menurut Chambers dalam Nanga (2006), “kemiskinan terutama di daerah pedesaan (rural poverty) adalah masalah ketidakberdayaan (powerlessness), keterisolasian (isolation), kerentanan (vulnerability) dan kelemahan fisik (physical weakness), dimana satu sama lain saling terkait dan mempengaruhi.

Gambar 1.2

Grafik Presentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009-2023



Sumber: BPS, Data Diolah (2024)

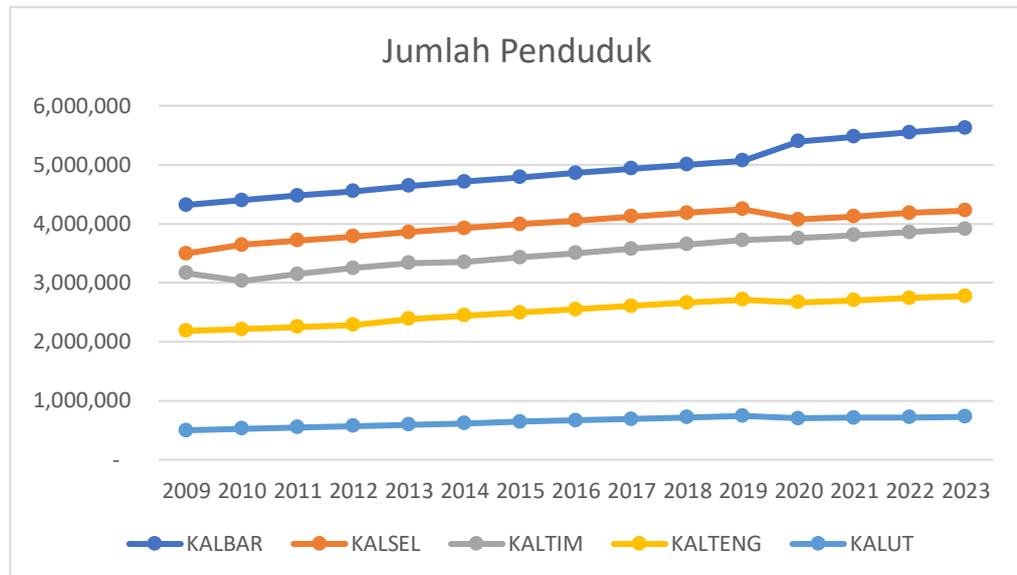
Pada gambar 1.2 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 mengalami penurunan. Pernah mengalami kenaikan pada tahun 2013-2014 kemudian turun sampai dengan tahun 2023. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat akhir-akhir ini mulai menunjukkan penurunan yang didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah berbagai kebijakan dan program bantuan sosial dari pemerintah, seperti bantuan langsung tunai, subsidi kebutuhan pokok, serta Program Keluarga Harapan (PKH) yang dirancang untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Program-program ini berkontribusi pada peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk adalah semua orang yang berdomisili di Indonesia selama minimal 6 bulan atau lebih, atau yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Siregar dan Wahuniarti (2008) menyatakan bahwa apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Bertambahnya umlah penduduk juga dipengaruhi mortalitas, dan migrasi. Jumlah penduduk yang tinggi akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja yang berdampak pada tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan.

Pertumbuhan jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh angka kelahiran yang stabil serta arus perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah yang lainnya. Menurut Mudrajad Kunchoro (1997), jumlah penduduk merupakan permasalahan mendasar bagi pembangunan perekonomian daerah dikarenakan pertumbuhan

jumlah penduduk yang tidak dapat dikendalikan sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan tidak tercapai.

Gambar 1.3
Grafik Presentase Jumlah Penduduk Provinsi di Pulau Kalimantan
Tahun 2009-2023



Pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa Jumlah penduduk dari tahun 2009-2023 terbanyak ada di Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat terus mengalami kenaikan, dari 4.319.142 jiwa di tahun 2009, menjadi 5.623.328 jiwa pada tahun 2023. Dibandingkan dengan provinsi yang ada di kalimantan lainnya, jumlah penduduk masih dibawah Kalimantan Barat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki dampak langsung terhadap sosial-ekonomi di Kalimantan Barat, seperti kebutuhan tempat tinggal, akses pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Hal ini bisa menjadi masalah kemiskinan jika tidak disertai dengan peningkatan infrastruktur dan pembangunan ekonomi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang mengukur

persentase penduduk dalam angkatan kerja yang sedang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, namun belum berhasil mendapatkannya. Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai kondisi ketenagakerjaan dan stabilitas ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi Tingkat Pengangguran Terbuka akan berdampak pada jumlah penduduk usia kerja yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia sehingga mempengaruhi angka kemiskinan dan kualitas hidup masyarakat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat mengalami fluktuasi, dengan angka sekitar 5,11% pada Tahun 2022 dan turun menjadi 5,05% pada 2023. Tingkat pengangguran ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan dengan penciptaan lapangan kerja baru, pergeseran sektor ekonomi, serta keterbatasan keterampilan tenaga kerja di beberapa daerah. Perbedaan kondisi ekonomi antar-kabupaten juga memengaruhi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Barat. Kota atau daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan pelatihan kerja cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah yang infrastruktur pendukungnya masih terbatas.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah atau daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin Andhykha et al., (2018). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga dimensi dasar meliputi kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan layak. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk menilai sejauh

mana penduduk suatu negara atau daerah dapat menikmati kehidupan yang sehat, berpendidikan, dan memiliki pendapatan yang mencukupi.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, variabel-variabel seperti jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia (IPM) sering dianalisis dengan tingkat kemiskinan. Namun, dari berbagai penelitian yang ada, belum banyak yang mengkaji secara spesifik di Kalimantan Barat. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya bersifat nasional atau berfokus pada Pulau Jawa dan Sumatera, sedangkan provinsi di luar wilayah tersebut, termasuk Kalimantan Barat, sering kali kurang menjadi pusat kajian empiris. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian yang perlu diisi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat.

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, maupun perguruan tinggi. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan suatu wilayah atau negara. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula tingkat pendidikan penduduk di wilayah tersebut. Rata-rata lama sekolah juga merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena mencerminkan dimensi pengetahuan. Indikator ini memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan, karena mencerminkan sejauh mana akses dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik dalam

melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah Rata-rata Lama Sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh beberapa tujuan penelitian, diantaranya:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan analisis kuantitatif yang menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Penelitian pada kali ini

menggunakan data sekunder yang langsung dari laman Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan teknik perhitungan data *Time Series* pada periode 2009-2023 di Provinsi Kalimantan Barat.

Ruang lingkup pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor pengaruh dari tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen atau variabel yang mempengaruhi adalah Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rata-rata Lama Sekolah.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan.
2. Bagi akademisi disarankan dapat menjadi referensi bagi para penelitian selanjutnya mengenai permasalahan yang serupa dan sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah, diharapkan pemerintah dapat mengevaluasi hasil dari penelitian ini untuk menurunkan angka kemiskinan.